

TANTANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DALAM *E-GOVERNMENT*

Adhi Iman Sulaiman

Universitas Jenderal Soedirman, Jl. Kampus No.1 Grendeng Purwokerto
adhi_iman@yahoo.com

Abstrak

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di era globalisasi, demokratisasi dan otonomi daerah atau desentralisasi sudah menjadi kebutuhan sekaligus tantangan khususnya bagi pemerintah. Pemerintah harus beradaptasi untuk memanfaatkan, menguasai dan mengembangkan TIK melalui *electronic government* (e-Gov) sebagai media pelayanan publik (*public service*), partisipasi publik (masyarakat), pemberdayaan masyarakat (*empowerment community*), pencitraan pemerintah, transparansi, akuntabilitas juga evaluasi bagi kemajuan pembangunan yang lebih sejahtera, merata dan berkeadilan

Kata kunci : Teknologi Komunikasi dan Informasi, Pelayanan Publik, Pemberdayaan

Abstract

The development of Information and Communication Technology (ICT) in the era of globalization, democratization and regional autonomy or decentralization has become a necessity as well as especially challenges for the government. Government must adapt to utilize, retain and develop ICT through electronic government (e-Gov) as media a public service, public participation, community empowerment, image local governments and the transparency, accountability and evaluation for development progress more prosperous, equitable and fairness.

Keywords : Information and Communication Technology, Public Service Empowerment

Tantangan sekaligus tuntutan di era abad ke-21 tidak bisa lepas bahkan dipisahkan dari teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau *Information Communication Technology* (ICT), karena interaksi sosial dengan berbagai kebutuhan dan kepentingan diberbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya, nyaris tidak ada lagi batas ruang, jarak dan waktu, bisa dimana saja dan kapan saja selama media dan aksesnya tersedia disebut McLuhan sebagai *global village*¹. Sehingga komunikasi sebagai

interaksi sosial tidak harus lagi dilakukan tatap muka secara langsung (secara fisik) tetapi bisa secara audio (suara) dan visual (gambar) dengan teknologi internet menggunakan *webcam*. Hal tersebut melalui akses atau sambungan (hubungan) melalui teknologi media komunikasi seperti *handphone* (hp) yang sekarang berkembang dengan *smartphone* atau dengan media komputer atau laptop dengan akses dan jaringan internet semua bisa dimiliki dalam genggam tangan. Semua fungsi komunikasi bisa didapatkan melalui TIK khususnya media internet, mulai dari fungsi

¹ Stephen Littlejohn, *Theories of Human Communication*. (Wadsworth Publishing Company. USA, 1997), hlm. 526

kebutuhan dan memberikan informasi, edukasi, sosialisasi, hiburan, sampai mempengaruhi dan membentuk opini.

Fenomena tersebut ada yang menyebutnya era milenium baru atau era globalisasi yang ditandai semakin bersatunya dunia, baik secara fisik maupun emosional, seperti menurut pendapat Ohmae dalam Wasistono² bahwa “dunia mendatang menjadi tanpa batas (*borderless world*) batas-batas fisik suatu Negara dan batas administrasi pemerintahan seolah-olah menjadi tidak berarti lagi”. Kalau menurut Rogers dan Schoemaker³ bahwa “kemajuan teknologi dan transportasi telah mendorong mobilitas yang tidak terikat jarak dan waktu. Begitupun Tubb dan Moss⁴ menyebutkan, “teknologi baru dapat dianggap sebagai perluasan media yang lebih interaktif dan menuju pada tatanan global”.

Sehingga perkembangan TIK juga menjadi tuntutan dan tantangan khususnya bagi lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pelayanan (*public service*) akan kebutuhan masyarakat (*public*) dan pemberdayaan (*empowering*) dari segala potensi dan sumber daya masyarakat dalam proses pembangunan secara luas demi kesejahteraan yang merata dan berkeadilan.

² Sadu Wasistono, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. (Fokus Media. Bandung 2003), hlm. 1

³ Everett M Roger and Floyd F, Schoemaker. : *Communication of Innovation : Cross Culture Approach*. (The Free Press. New York, 1983), hlm. 14

⁴ Stewart L. Tubbs dan Moss, Sylvia. 2001. *Human Communication : Konteks-Konteks Komunikasi*. Terjemahan Deddy Mulaya dan Gembirasari. (Rosdakarya. Bandung, 2001), hlm. 225

Perwujudannya dengan adanya UU No 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam Pasal 4 bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan : (a) mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; (b) mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (c) meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik, (d) membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, (e) memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi penyelenggara teknologi informasi.

Kemudian menurut Pasal 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa : (a) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; (b) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; (c) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; (d) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung-jawabkan; (e)

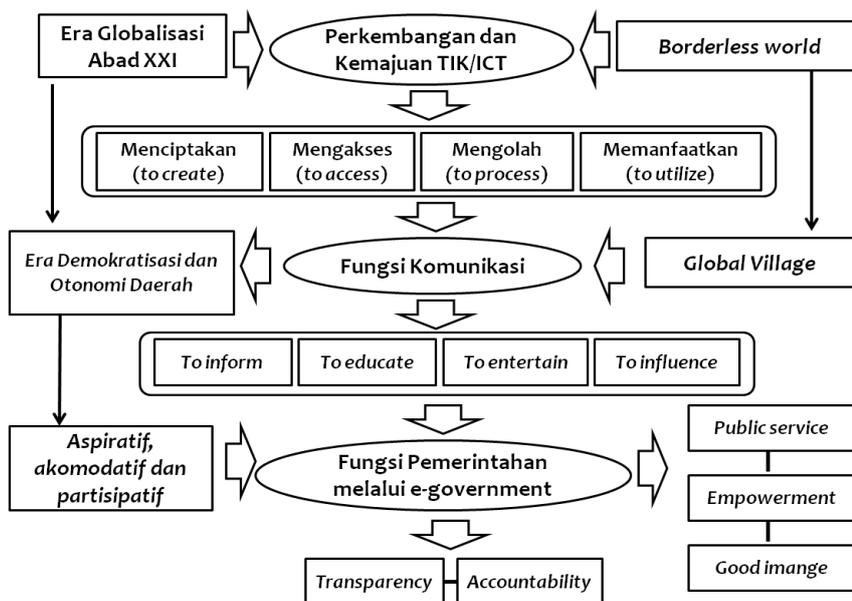
mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; (f) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau (g) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Selanjutnya dalam Keppres No 6 Tahun 2001 sebagai pedoman bagi pemanfaatan dan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi di dalam sistem administrasi pemerintahan. Kemudian dikelurakannya Inpres No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government (e-Gov)* Indonesia” antara lain berisikan panduan yang sudah disosialisasikan, seperti: (1) Panduan pembangunan infrastruktur portal pemerintah, (2) Panduan manajemen sistem dokumen elektronik,

(3) Panduan penyusunan rencana induk pengembangan *e-Gov* lembaga. (4) Panduan penyelenggaraan situs web pemerintah daerah, (5) Panduan tentang pendidikan dan pelatihan SDM *e-Gov*.

Bahkan dalam Indonesia 2005 – 2025 Buku Putih tentang penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh Kemenristek RI (2006) bahwa secara umum, pembangunan Iptek di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing bangsa, memperkuat kesatuan dan persatuan nasional, mewujudkan pemerintahan yang transparan, dan meningkatkan jati diri bangsa di tingkat internasional. Berdasarkan penjelasan tersebut maka bisa dibuat suatu deskripsi bagan sebagai berikut :

Gambar 1 : Perkembangan dan Pemanfaatan TIK untuk e-Gov



Tuntutan dan Tantangan TIK dalam E-Gov

Seiring era milenium abad ke-21 dan era globalisasi, di lembaga pemerintahan sendiri ada tuntutan dan tantangan berupa era otonomi daerah yang juga menjadi keharusan dalam melakukan percepatan pembangunan daerah (secara otonom) sekaligus tetap berintegrasi secara integral dengan pemerintah daerah lain (bekerjasama) serta dengan pemerintah pusat. Maka dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan sudah menjadi keharusan untuk dapat memanfaatkan, menguasai, dan mengembangkan TIK dengan menyelenggarakan *Electronic Government* (*e-Government*). Apalagi dalam konteks melaksanakan pelayanan publik (*public service*) yang cepat dan tuntutan era demokratisasi dimana masyarakat menuntut kebebasan menyampaikan aspirasi, hak mendapatkan informasi, transparansi serta akuntabilitas pemerintah (pejabat publik).

Mengutip dari Jurnal tulisan artikel Hasibuan⁵, Bahwa *E-Government* pada dasarnya memberikan layanan informasi kepada sesama insitusi pemerintah (*Government to Government – G2G*), kepada dunis bisnis (*Government to Business – G2B*) dan kepada masyarakat (*Government to Citizen – G2C*), dengan tujuan sbb: (1) Mampu memberikan informasi lengkap mengenai lembaga atau daerah untuk kemajuan ekonomi dan

⁵ Zainal A. Hasibuan, “Langkah-langkah Strategis dan Taktis Pengembangan E-Government untuk Pemda”, (*Jurnal Sistem Informasi MTI UI Vol 3 – No. 1 – April 2007*), hlm. 67-68

pembangunan daerah, dan peningkatan kinerja proses pelayanan (peningkatan efektivitas dan produktivitas). (2) Mampu mengoptimalkan penggunaan sumberdaya (*resources*) seperti waktu, tenaga, *budget*, dan fasilitas lainnya (peningkatan efisiensi).

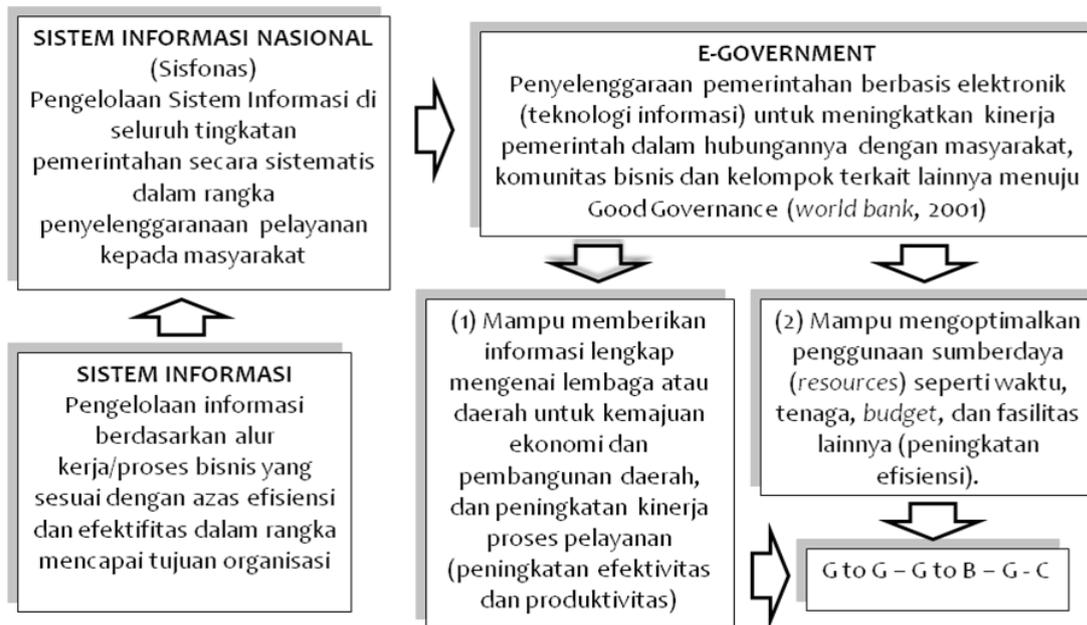
Tuntutan dan kebutuhan akan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) khususnya oleh pemerintah melalui *electronic Government* (*e-Gov*) dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, partisipasi, implementasi, evaluasi dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan di era demokratisasi, otonomi daerah dan desentralisasi sebagai tuntutan reformasi. E-Gov sendiri adalah penggunaan TIK dalam domain administrasi (termasuk penyediaan layanan publik, peraturan, penegakan hukum, keamanan, peningkatan efisiensi birokrasi dan pembuatan kebijakan) dan domain politik (sejumlah aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana masyarakat membuat keputusan dan mewujudkan nilai-nilai yang mengikat anggotanya) di tingkat lokal, nasional, regional, dan global⁶.

Kemudian kerangka pengembangan *e-Gov* di Indonesia dapat mengacu kepada Kerangka Sistem Informasi Nasional (Sisfonas) yang dimodifikasi dari Hasibuan⁷ yaitu :

⁶ Seri Modul Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan Modul 2 tentang Kebijakan, Proses, dan Tata Kelola TIK untuk Pembangunan, dari *Economic and Social Commission for Asia and Pacific* (Escap) dan *Asian and Pasific Training Centre for Information and Communication Technology for Development* (Apcict) Tahun 2009) 57-58

⁷ Zainal, *ibid.*, hlm. 67

Gambar 2 : Konseptualisasi dan Manfaat Sistem Informasi Nasional untuk E-Gov dimodifikasi dari Hasibuan (2007: 67)



Lebih lanjut hasil riset dari Hasibuan⁸ memberikan perbandingan *e-Government* di Malaysia yang sangat komprehensif dibandingkan dengan di Indonesia. Semisal untuk sistem kependudukannya dengan mengeluarkan kartu identitas yang bernama MyKad. MyKad merupakan *government multi-purpose card* yang ditangani oleh lima agensi pemerintahan Malaysia, yaitu Jabatan Pendaftaran Negara (JPN), Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), Polis Diraja Malaysia (PDRM), Kementerian Kesehatan, Jabatan Keimigrasian. MyKad berupa *smart card* yang memiliki chip berkapasitas 64K yang menyimpan berbagai data seperti identitas warga (termasuk data biometrik berupa sidik jari dan *iris pattern*), surat izin mengemudi, *MEPS cash (equally cash card function)*, kartu ATM, *transportation cards* (Touch 'n Go), dan catatan medis.

⁸ *Ibid.*, hlm. 67

Kalau di Indonesia pelaksanaan pembuatan e-KTP oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan, Departemen Dalam Negeri, awal sampai pertengahan tahun 2012 baru tahapan pendataan, pemanggilan pembuatan foto e-KTP di setiap kecamatan, desa atau kelurahan yang sudah dilaksanakan di sebagian daerah. Dalam inisiatif tersebut, pemerintah menetapkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional yang menggunakan Nomor Induk Penduduk (NIK). Dengan NIK ini, akan dijamin bahwa, setiap penduduk hanya memiliki satu dan hanya satu nomor KTP.

Bahkan dalam hasil riset dan kajian dari Direktorat Aparatur Negara Kementerian Negara PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa, mayoritas situs *website* Pemerintah Daerah masih berada pada tingkat *pertama*

(persiapan) dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat *dua* (pematangan), sedangkan tingkat *tiga* (pematapan) dan *empat* (pemanfaatan) belum tercapai. Adapun Tingkat penggunaan TIK atau yang paling awal memiliki karakteristik penggunaan sarana TIK dalam hal ini komputer hanya semata-mata untuk sarana input data internal, administrasi pelayanan publik, dan pengolahan data serta sarana TIK yang masih terbatas. Pada tingkat kedua sudah adanya mengembangkannya untuk kepentingan proses kerja internal organisasi yang lebih luas. Pemanfaatan *Local Area Network* sudah dikembangkan, dan pertukaran data yang diperlukan antar unit sudah mulai terjadi serta sudah mulai mengembangkan *website* sendiri atau bergabung dengan pemerintah daerah (Pekab atau Pemkot). Tingkat

ketiga, sudah mengembangkannya untuk kepentingan proses kerja internal organisasi yang lebih luas dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing stakeholder. Sedangkan tingkat keempat pemanfaatan TIK dinyatakan optimal jika menghasilkan pelayanan publik yang efisien dari segi biaya, waktu, dan tenaga. Adapun faktor penting untuk menentukan peningkatan pemanfaatan TIK dan komunikasi bagi pelayanan publik adalah (1) faktor organisasi, (2) faktor kebijakan, (3) faktor manajemen, (4) faktor SDM, (5) faktor kapasitas *hardware*, dan (6) kapasitas *software*

Berikut ini melalui berbagai masukkan data yang ada maka dapat dilihat kondisi dari implementasi penyelenggaraan situs web lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan (*e-gov*)⁹ antara lain:

Kondisi situs web resmi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota

	Jumlah	Situs Web	%	Bisa dibuka	Tidak bisa	Belum punya situs
Pemkab/ pemkot	465	194	42%	186 (98%)	8 (4%)	271

sumber : <http://www.depkominfo.go.id> (2/5/2008)

Kondisi situs web resmi Pemerintah Daerah Provinsi

	Jumlah	Situs Web	%	Bisa dibuka	Tidak bisa	Belum punya situs
Pemrov	33	31	94%	26 (84%)	5 (16%)	2

sumber : <http://www.depkominfo.go.id> (2/5/2008)

⁹ Sosiawan, Edwi, Arief. artikel "Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi E-Government Indonesia", (Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UPN Veteran Yogyakarta, 2008)

Kondisi situs web resmi Lembaga Tinggi dan Lembaga Non Departemen

	Jumlah	Situs Web	%	Bisa dibuka	Tidak bisa	Belum punya situs
Dept/Kem/Lembaga Tinggi	37	37	100%	37 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Lembaga Pem. Non Departemen	32	28	88%	28 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

sumber : <http://www.depkominfo.go.id> (2/5/2008)

Hal ini ditegaskan dalam Modul Kebijakan, Proses, dan Tata Kelola TIK untuk Pembangunan¹⁰ bahwa pemerintah di seluruh dunia semakin fokus pada teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pembangunan atau *Information and Communication Technology for development* (ICTD), yang tidak hanya berarti pengembangan industri atau sektor TIK, tetapi juga mencakup penggunaan TIK untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan politik. Secara spesifik, pemerintah diharapkan menciptakan kebijakan ICTD yang mencakup berbagai bidang, seperti penciptaan lingkungan yang mendukung kebijakan dan peraturan, akses ke infrastruktur dasar, mempercepat pengembangan keahlian dasar TIK, pengembangan materi dan aplikasi TIK untuk pembangunan, dan memajukan penelitian dan pengembangan TIK untuk menghasilkan solusi yang inovatif.

Manfaat dan Konsekuensi TIK dalam E-Gov

Tuntutan dan pemanfaatan atas kemajuan TIK khususnya oleh pemerintah membawa manfaat dan konsekuensi,

yaitu.: (1) menurunkan biaya administrasi; (2) meningkatkan kemampuan respons terhadap berbagai permintaan dan pertanyaan tentang pelayanan publik baik dari sisi kecepatan maupun akurasi; (3) dapat menyediakan akses pelayanan untuk semua departemen dan non departemen pada semua tingkatan; (4) wahana untuk menjalin interaksi, aspirasi, akomodasi dan sosialisasi sebagai salah satu strategi *public relations* (PR) atau kehumasan bagi pemerintah kepada publik. Karena *public relations* (PR) adalah salah satu bentuk komunikasi yang bertujuan menciptakan kerja sama dan hubungan yang harmonis antara suatu lembaga/perusahaan dengan publik, baik publik internal maupun eksternal. PR didefinisikan sebagai manajemen komunikasi antara suatu organisasi dan publiknya¹¹. Kemudian pendapat yang sama dijelaskan oleh Maksum¹² bahwa PR didefinisikan sebagai komunikasi yang dilakukan oleh suatu organisasi dengan orang-orang yang berkepentingan guna mendapatkan

¹⁰ Escape, *ibid.*, hlm. 4

¹¹ Davis, A. *Everything You Should Know About Public Relations*. Panduan Lengkap Tentang PR. (Gramedia. Jakarta, 2003)

¹² Maksum. "Perpustakaan Dalam Perspektif Public Relations", (Jurnal Perpustakaan Pertanian Vol. 18, Nomor 2, 2009), hlm. 31

perhatian mereka dengan menggunakan cara-cara yang menguntungkan. Dengan demikian, kedudukan PR dalam suatu lembaga atau perusahaan adalah sebagai suatu organisasi yang berfungsi sebagai metode untuk membangun kepercayaan publik. (5) sebagai sarana partisipasi masyarakat untuk menyalurkan umpan balik secara bebas, tanpa perlu rasa takut. Berbagai manfaat tersebut pada akhirnya diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan pemerintahan secara umum. (6) Melaksanakan pelayanan publik (*public service*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment community*) lebih cepat dan mudah, contoh dengan penggunaan internet misalnya fungsi kebutuhan pelayanan administrasi bisa dilakukan secara *online* seperti Electronic KTP (e-KTP) yang sekarang sedang dirintis pemerintah. (7) Informasi, sosialisasi dan kampanye program pembangunan dari pemerintah akan cepat diakses atau didapatkan oleh masyarakat melalui media internet yaitu website pemerintah. (8) Melibatkan partisipasi masyarakat dengan adanya akses aspirasi tentang pembangunan termasuk transparansi, akuntabilitas dan evaluasi implementasi kebijakan serta pembangunan bisa cepat di respons dan dikontrol melalui layanan informasi via telpon dan internet via *short message service* (sms) atau juga email (*electronic mail*) serta website pemerintah. (9) Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, karena internet menyediakan sumber informasi serta referensi di segala bidang.

Hal tersebut mendapat penguatan dari beberapa pendapat seperti Rice¹³ bahwa TIK memberikan manfaat yaitu pada sektor produksi di bidang ekonomi, perbaikan administrasi sektor publik, khususnya yang transparansi dalam proses pengadaan untuk kontrak pelayanan publik telah mengurangi praktik korupsi, meningkatkan potensi pendidikan. Kemudian menurut Corner¹⁴, dan McQuail¹⁵ bahwa peran teknologi mampu menginformasikan dan menggambarkan seluruh kegiatan politik melalui jaringan komunikasi yang mampu menjangkau audien lebih luas dan bentuk yang lebih menarik. Sebab melalui sistem multi media yang mengintegrasikan antara teks, gambar dan suara, tayangan atau tampilan sebuah peristiwa lebih mudah difahami dan dicerna oleh khalayak media.

Kemudian ada konsekuensi yang harus diantisipasi dari kemajuan TIK yang disalahgunakan seperti : (1) . Adanya kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) dari ulah hacker, manipulasi data dan membobol website dan menyebarkan virus ke program dan data. Kemudian kejahatan melalui sms atau telpon (*handphone*) dan internet seperti : penipuan, pemerasan, penculikan, pronografi sampai ke pornoaksi di kalangan masyarakat. Hal tersebut akan menjadi

¹³ Rice, Mitchell F. "The Global Digital". Editor: Mcphail, Thomas L, *Development Communication: Reframing The Role of The Media*. (Blackwell Publishing, United Kingdom, 2009), hlm. 123

¹⁴ Cornet, John. *Mass Communications Research: Mass Communication Review Yearbook*. (Page Publication Beverly Hill, 1984), hlm. 89

¹⁵ Denis, McQuail. *Mass Communication Theory: An Introduction*. (CA : Sage Beverly Hill, 1987), hlm. 234

permasalahan bagi pemerintah, karena terjadi keresahan sosial dan konflik sosial. (2) Terjadi keterbatasan teknologi secara teknis, seperti jika menggunakan internet komputer ada masalah di *hardware* dan *software* serta listrik mati maka bisa saja data akan hilang dan pelayanan publik yang menjadi terganggu. Termasuk permasalahan koneksi akses jaringan internet, begitupun jika terputusnya akses jaringan telepon. (3) Melalui website pemerintah bisa saja dipergunakan untuk motif politik seperti publikasi dan berkampanye dengan agenda setting yang dirancang bahkan bisa memanipulasi untuk pencitraan pemerintah secara lembaga dan atau secara profil kepala daerah. (4) Masyarakat (publik) bisa secara bebas memberikan aspirasi lewat *handphone* (hp) terutama via sms atau email yang sifatnya destruktif atau tidak membangun seperti memberi data atau informasi yang vikatif, menghujat, memfitnah dan mengadu domba yang mengakibatkan keresahan, konflik bahkan pertikaian di masyarakat. (5) Kendala teknis yaitu kesenjangan akses dan infrastruktur jaringan yang tidak semuanya dapat menjangkau tempat seperti ke desa-desa yang berada dipedalaman atau pelosok. (6) Ketimpangan kemampuan masyarakat akan fasilitas media TIK yang dimiliki terbatas bahkan tidak terjangkau, juga pemahaman dan kemampuan/kemahiran (*skill*) dalam melakukan oprasionalisasi akses media masyarakat masih terbatas.

Hal tersebut di tegaskan Aida Vitalaya Hubeis apa yang disebut *digital*

divide yaitu kesenjangan akses fisik dan kesenjangan sumber daya serta keterampilan untuk berpartisipasi aktif sebagai suatu *digital citizen*¹⁶.

Padahal menurut rencana aksi *World Summit on the Information Society* (WSIS) diselenggarakan di Geneva pada tahun 2003, bahwa "...setiap orang semestinya mendapatkan kesempatan untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memahami, berpartisipasi, dan merasakan manfaat dari Masyarakat Informasi (*Information Society*) dan Ekonomi Pengetahuan (*Knowledge Economy*)"¹⁷.

Kemudian menurut hasil riset dan kajian dari Direktorat Aparatur Negara Kementerian Negara PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Secara umum pemanfaatan TIK oleh instansi pemerintah belum optimal dan bahwa inisiatif tersebut di atas belum menunjukkan arah pembentukan *e-Government* yang baik. Beberapa kelemahan yang menonjol antara lain adalah pelayanan yang diberikan melalui situs pemerintah tersebut, belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif dan belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan TIK pada masing-masing instansi.

¹⁶ Hubeis, Aida Vitalaya. 2009, "Perilaku Masyarakat Dalam Pemanfaatan *Information and Communication Technology* Dalam Mendukung Pengembangan Masyarakat Global". (Prosiding Forkapi Tahun 2009), hlm. 157

¹⁷ Escape, *ibid.*, hlm. 4

Simpulan

Perkembangan TIK di era globalisasi, demokratisasi dan otonomi daerah atau desentralisasi sudah menjadi kebutuhan sekaligus tantangan khususnya bagi pemerintah. Pemerintah harus beradaptasi untuk memanfaatkan, menguasai dan mengembangkan TIK melalui e-Gov sebagai media pelayanan publik (*public service*), partisipasi publik (masyarakat), pemberdayaan masyarakat (*empowerment community*), termasuk media pencitraan pemerintah dan daerah dalam meningkatkan prestasi-prestise (karya dan nama baik), kemudian e-Gov bisa dijadikan media untuk transparansi, akuntabilitas serta evaluasi bagi kemajuan pembangunan yang lebih sejahtera, merata dan berkeadilan.

Beberapa pendapat menyatakan seperti menurut MacBride¹⁸ yang mengingatkan dampak negatif akibat teknologi komunikasi yang menyebutkan disamping teknologi modern memberikan prospek baru bagi perkembangan komunikasi juga menimbulkan bahaya dan masalah. Kita harus menahan diri (mengontrol) untuk menganggap teknologi sebagai alat struktural yang serba bisa di negara maju dan berkembang.

Sehingga Denis McQuail¹⁹ diantaranya menyarankan: (1) media

seyogyanya menerima dan melaksanakan tugas pembangunan positif yang sejalan dengan kebijaksanaan yang diterapkan secara nasional. (2) kebebasan media seyogyanya dibatasi sesuai dengan prioritas ekonomi dan kebutuhan pembangunan masyarakat. (3) media perlu memprioritaskan isi dan bahasa nasional. (4) media hendaknya memprioritaskan berita dan informasinya pada negara sedang berkembang. (5) bagi kepentingan tujuan pembangunan, negara memiliki hak untuk campur tangan dalam membatasi, mengoprasionalakan media dan sarana penyensoran untuk pengendalian.

Kemudian pemerintah memiliki rencana untuk melakukan program pelatihan dan keterampilan atau keahlian TIK kepada para aparatur pemerintah sampai ke tingkat daerah dan desa. Termasuk perluasan infrastruktur perlengkapan dan sistem jaringan TIK sampai ke tingkat daerah dan desa. Kesemuanya itu dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pemerintah yang lebih efektif, efisien, tepat dan cepat sasaran yaitu dalam melakukan pelayanan publik, menampung dan merespon aspirasi masyarakat, mensosialisasikan, melaksanakan, mempromosikan sampai evaluasi (akuntabilitas) program pemerintah.

¹⁸ Sean McBride, *Communication and Society: Today and Tomorrow : Many Voice One World*. Kogan Page. London, 1980), hlm. 60

¹⁹ McQuail, *Ibid.*, hlm 119-120

Daftar Pustaka

- Cornet, John. 1984. *Mass Communications Research : Mass Communication Review Yearbook*. Page Publication Beverly Hill
- Davis, A. 2003. *Everything You Should Know About Public Relations*. Panduan Lengkap Tentang PR. Gramedia. Jakarta
- Denis, McQuail. 1987, *Mass Communication Theory : An Introduction*. CA : Sage Beverly Hill.
- Hasibuan, Zainal A. “Langkah-langkah Strategis dan Taktis Pengembangan E-Government untuk Pemda”, *Jurnal Sistem Informasi MTI UI* Vol 3 – No. 1 – April 2007
- Hubeis, Aida Vitalaya. 2009, “Perilaku Masyarakat Dalam Pemanfaatan *Information and Communication Technology* Dalam Mendukung Pengembangan Masyarakat Global”. Prosiding Forkapi Tahun 2009
- Littlejohn, Stephen. W, 1997. *Theories of Human Communication*. Wadsworth Publishing Company. USA
- Maksum. “Perpustakaan Dalam Perspektif Public Relations”, *Jurnal Perpustakaan Pertanian* Vol. 18, Nomor 2, 2009
- McBride, Sean. 1980, *Communication and Society : Today and Tomorrow : Many Voice One World*. Kogan Page. London
- Rice, Mitchell F. 2009, “The Global Digital”. Editor : Mcphail, Thomas
- L, *Development Communication : Reframing The Role of The Media*. Blackwell Publishing. United Kingdom
- Roger, Everett M and Floyd F, Schoemaker. 1983 : *Communication of Innovation : Cross Culture Approach*. The Free Press. New York
- Sosiawan, Edwi, Arief. 2008, artikel “Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi E-Government Indonesia”, Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UPN Veteran Yogyakarta
- Tubbs, Stewart L dan Moss, Sylvia. 2001. *Human Communication : Konteks-Konteks Komunikasi* (Terjemahan Deddy Mulaya dan Gembirasari). Rosdakarya. Bandung
- Wasistiono, Sadu. 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Fokus Media. Bandung

Sumber lain :

Buku Putih “Indonesia 2005-2025 tentang Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”, Kementerian Negara dan Teknologi RI, Tahun 2006

Kajian tentang “Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelayanan Publik”, dilaksanakan dan diterbitkan oleh Direktorat Aparatur Negara Kementerian Negara PPN/Badan Perencanaan pembangunan Nasional, Tahun 2009

Seri Modul Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan Modul 2 tentang Kebijakan, Proses, dan Tata Kelola TIK untuk Pembangunan, dari *Economic*

and Social Commission for Asia and Pacific (Escap) dan Asian and Pasific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (Apcict) Tahun 2009